



**LAPORAN KEUANGAN  
KOMISI YUDISIAL RI  
TAHUN ANGGARAN 2018  
(AUDITED)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*).

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 22 April 2019  
Plt. Sekretaris Jenderal,



Ronny Dolfinus Tulak  
NIP.19590702 198703 1 001

## DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	23
B.3. Belanja Pegawai	23
B.4. Belanja Barang	25
B.5. Belanja Modal	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Kas Lainnya dan Seara Kas	28
C.2. Belanja dibayar Dimuka	29
C.3. Persediaan	30
C.4. Tanah	31
C.5. Peralatan dan Mesin	32
C.6. Gedung dan Bangunan	38
C.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan	39
C.8. Aset Tetap Lainnya	40
C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
C.10. Aset Tak Berwujud	42
C.11. Aset Lain-lain	43
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	43

<b>KETERANGAN</b>	<b>Halaman</b>
C.13. Utang Kepada Pihak Ketiga	43
C.14. Pendapatan Diterima Dimuka	44
C.15. Utang Jangka Pendek Lainnya	44
C.16. Ekuitas	45
<b>D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional</b>	
D.1. PNBK	46
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	48
D.4. Beban Barang dan Jasa	49
D.5. Beban Pemeliharaan	51
D.6. Beban Perjalanan Dinas	52
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	53
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	54
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	54
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	54
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	55
D.13. Surplus / Defisit – LO	55
<b>E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas</b>	
E.1. Ekuitas Awal	56
E.2. Surplus (Defisit) LO	56
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	56
E.4. Transaksi Antar Entitas	56
E.5. Ekuitas Akhir	56
<b>F. Pengungkapan Penting Lainnya</b>	57



## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450  
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 April 2019  
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ronny Dolfinus Tulak  
NIP.19590702 198703 1 001



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 20 Februari 2019  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal,

Ronny Dolfinus Tulak  
NIP 195907021987031001/

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2018 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.288.907,00 dengan Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.611.384.386,00 atau mencapai 99,34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp122.421.071.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp117.711.832.193,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp831.562.453,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp115.848.161.696,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.032.108.044,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp146.886.742,00 dan Rp117.564.945.451,00

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp86.103.972,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp124.115.270.137,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai (Rp124.029.166.165,00). Kegiatan Non Operasional *surplus* sebesar Rp27.249.192,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp124.001.916.973,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp118.148.316.347,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp124.001.916.973,00) kemudian ditambah dengan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp1.849.450.598,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp121.569.095.479,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp117.564.945.451,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018			31 DESEMBER 2017
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	42.288.907,00	~	163.139.211,00
Jumlah Pendapatan	0,00	42.288.907,00	~	163.139.211,00
<b>BELANJA</b>				
1. Belanja Pegawai	33.629.761.000,00	33.621.815.707,00	99,98	29.230.307.707,00
2. Belanja Barang	86.063.107.000,00	85.284.151.512,00	99,09	83.458.856.862,00
3. Belanja Modal	2.728.203.000,00	2.705.417.167,00	99,16	3.311.919.845,00
Jumlah Belanja	122.421.071.000,00	121.611.384.386,00	99,34	116.001.084.414,00

## II. NERACA

### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas Lainnya dan Setara Kas	6.448.280,00	0,00	6.448.280,00	~
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	340.575.001,00	442.033.463,00	(101.458.462,00)	(22,95)
Persediaan	484.539.172,00	600.075.136,00	(115.535.964,00)	(19,25)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>831.562.453,00</b>	<b>1.042.108.599,00</b>	<b>(210.546.146,00)</b>	<b>(20,20)</b>
Aset Tetap				
Tanah	48.799.520.400,00	47.188.389.400,00	1.611.131.000,00	3,41
Peralatan dan Mesin	49.765.110.623,00	48.589.855.918,00	1.175.254.705,00	2,42
Gedung dan Bangunan	72.314.003.716,00	71.676.580.588,00	637.423.128,00	0,89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.901.048.257,00	1.256.182.536,00	644.865.721,00	51,34
Akumulasi Penyusutan	(60.520.390.928,00)	(55.508.859.059,00)	(5.011.531.869,00)	9,03
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>115.848.161.696,00</b>	<b>116.791.019.011,00</b>	<b>(942.857.315,00)</b>	<b>(0,81)</b>
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	3.017.355.940,00	2.304.693.472,00	712.662.468,00	30,92
Aset Lain-lain	100.987.032,00	522.029.174,00	(421.042.142,00)	(80,65)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.086.234.928,00)	(2.306.640.618,00)	220.406.690,00	(9,56)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>1.032.108.044,00</b>	<b>520.082.028,00</b>	<b>512.026.016,00</b>	<b>98,45</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>117.711.832.193,00</b>	<b>118.353.209.638,00</b>	<b>(641.377.445,00)</b>	<b>(0,54)</b>

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	Jumlah	%
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	129.925.795,00	131.992.624,00	(2.066.829,00)	(1,57)
Pendapatan di terima di muka	10.512.667,00	72.900.667,00	(62.388.000,00)	(85,58)
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.448.280,00	0,00	6.448.280,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>146.886.742,00</b>	<b>204.893.291,00</b>	<b>(58.006.549,00)</b>	<b>(28,31)</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>146.886.742,00</b>	<b>204.893.291,00</b>	<b>(58.006.549,00)</b>	<b>(28,31)</b>
Ekuitas Dana				
Ekuitas	117.564.945.451,00	118.148.316.347,00	(583.370.896,00)	(0,49)
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>117.564.945.451,00</b>	<b>118.148.316.347,00</b>	<b>(583.370.896,00)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>117.711.832.193,00</b>	<b>118.353.209.638,00</b>	<b>(641.377.445,00)</b>	<b>(0,54)</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	86.103.972,00	78.157.000,00	7.946.972,00	10,17
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>86.103.972,00</b>	<b>78.157.000,00</b>	<b>7.946.972,00</b>	<b>10,17</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	33.621.815.707,00	29.230.307.707,00	4.391.508.000,00	15,02
Beban Persediaan	1.062.540.070,00	1.029.249.567,00	33.290.503,00	3,23
Beban Barang dan Jasa	36.525.256.208,00	38.057.759.596,00	(1.532.503.388,00)	(4,03)
Beban Pemeliharaan	5.219.023.255,00	5.672.595.978,00	(453.572.723,00)	(7,00)
Beban Perjalanan Dinas	41.786.010.890,00	38.922.319.607,00	2.863.691.283,00	7,36
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	542.719.000,00	534.743.742,00	7.975.258,00	1,50
Beban Penyusutan & Amortisasi	5.357.905.007,00	5.257.791.246,00	100.113.761,00	1,90
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>124.115.270.137,00</b>	<b>118.704.767.443,00</b>	<b>5.410.502.694,00</b>	<b>4,56</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(124.029.166.165,00)</b>	<b>(118.626.610.443,00)</b>	<b>(5.402.555.722,00)</b>	<b>4,55</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11.250.000,00	100.000,00	11.150.000,00	11,15
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7.643.538,00	2.840.926,00	4.802.612,00	169,05

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>	<b>3.606.462,00</b>	<b>(2.740.926,00)</b>	<b>6.347.388,00</b>	<b>(231,58)</b>
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	79.241.255,00	50.614.737,00	28.626.518,00	56,56
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	55.598.525,00	7.607.472,00	47.991.053,00	630,84
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>23.642.730,00</b>	<b>43.007.265,00</b>	<b>(19.364.535,00)</b>	<b>(45,03)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>27.249.192,00</b>	<b>40.266.339,00</b>	<b>(13.017.147,00)</b>	<b>(32,33)</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>(124.001.916.973,00)</b>	<b>(118.586.344.104,00)</b>	<b>(5.415.572.869,00)</b>	<b>4,57</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>118.148.316.347,00</b>	<b>120.896.715.248,00</b>	<b>(2.748.398.901,00)</b>	<b>(2,27)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(124.001.916.973,00)</b>	<b>(118.586.344.104,00)</b>	<b>(5.415.572.869,00)</b>	<b>4,57</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas</b>	<b>1.849.450.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.450.598,00</b>	~
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.849.450.598,00	0,00	1.849.450.598,00	~
Koreksi Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	121.569.095.479,00	115.837.945.203,00	5.731.150.276,00	4,95
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(583.370.896,00)	(2.748.398.901,00)	2.165.028.005,00	(78,77)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>117.564.945.451,00</b>	<b>118.148.316.347,00</b>	<b>(583.370.896,00)</b>	<b>(0,49)</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "checks and balances" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Mejaiga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan

berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Hakim dan Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih

### (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan  
Aset Tetap

### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama kali*

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam

penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan  
Rp42.288.907,00

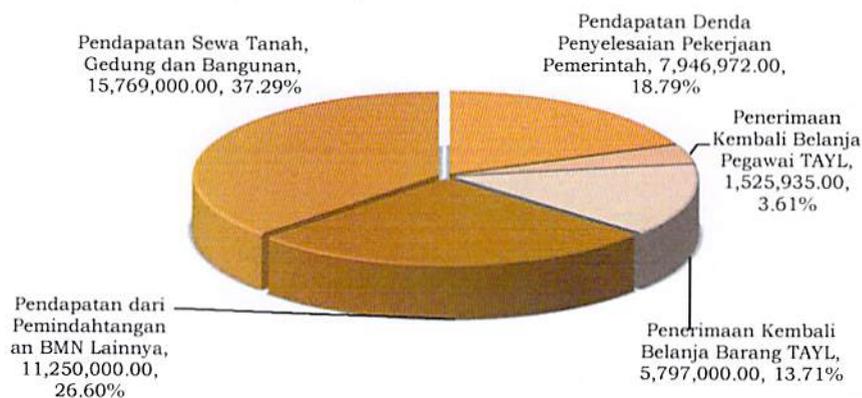
**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.288.907,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	11.250.000,00	~
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	15.769.000,00	~
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	7.946.972,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	1.525.935,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	5.797.000,00	~
Jumlah	0,00	42.288.907,00	~

Grafik 1  
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2018 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.250.000,00 yang berasal dari Penjualan BMN berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) unit Barang Perlengkapan Kantor sesuai Hasil Bersih Lelang Nomor:017/26/2018 Tanggal 17 Januari 2018.

## 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.769.000,00 yang berasal dari Pendapatan Sewa Kios/Kantin Komisi Yudisial RI seluas 69,3m<sup>2</sup> sebesar Rp15.769.000,00 periode 03 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019.

## 3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.946.972,00 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan Audit Operasional Semester I Tahun Anggaran 2018 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Komisi Yudisial berupa Penggantian Granit Lantai Tangga.

## 4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.525.935,00 yaitu Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum an. Untung Maha Gunadi yang terlanjur dibayarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

## 5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.797.000,00 yaitu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Konseler Tahun Anggaran 2017.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar (74,08) persen dengan rincian sebagai berikut:

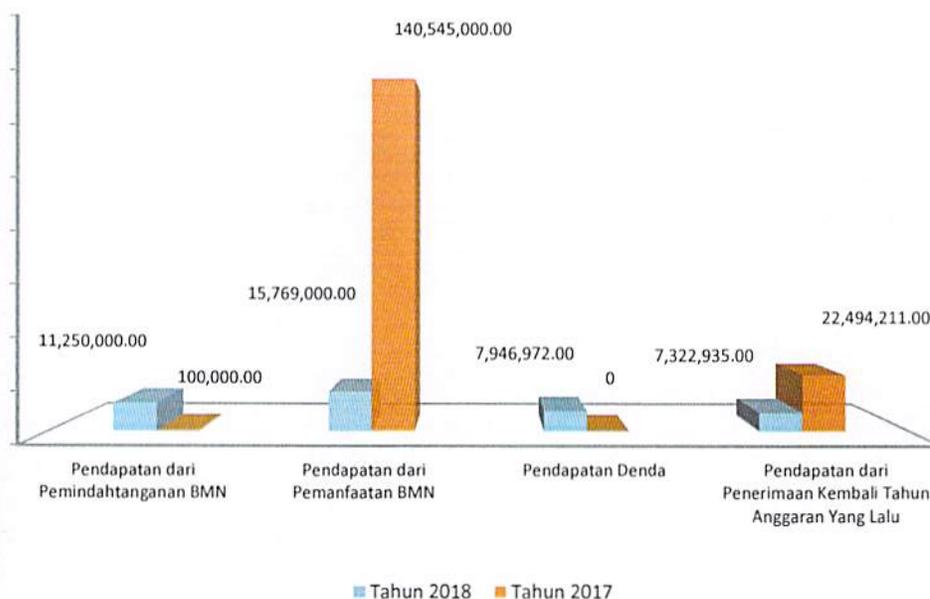
*Tabel 2*  
*Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018 dan 2017*

<i>Uraian Akun</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2018</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2017</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</i>	<i>11.250.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>11.150,00</i>
<i>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</i>	<i>15.769.000,00</i>	<i>140.545.000,00</i>	<i>(88,78)</i>
<i>Pendapatan Denda</i>	<i>7.946.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>~</i>
<i>Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	<i>7.322.935,00</i>	<i>22.494.211,00</i>	<i>(67,45)</i>
<i>Jumlah</i>	<i>42.288.907,00</i>	<i>163.139.211,00</i>	<i>(74,08)</i>

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018 dengan 2017 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dengan 2017



Realisasi Belanja  
Negara  
Rp121.611.384.386,00

## B.2. Belanja

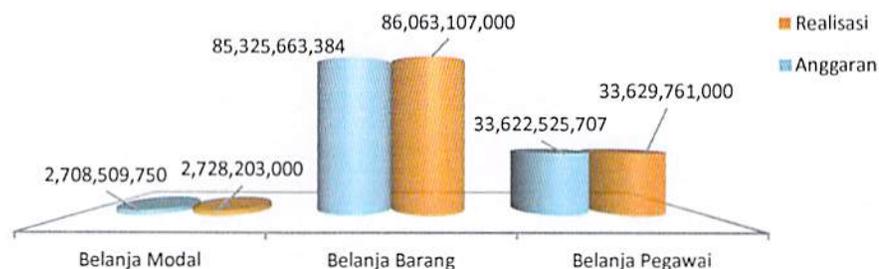
Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.611.384.386,00 atau 99,34% dari anggaran belanja sebesar Rp122.421.071.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	33.629.761.000,00	33.622.525.707,00	99,98
Belanja Barang	86.063.107.000,00	85.325.663.384,00	99,14
Belanja Modal	2.728.203.000,00	2.708.509.750,00	99,28
Total Belanja Kotor	122.421.071.000,00	121.656.698.841,00	99,38
Pengembalian Belanja	0,00	(45.314.455,00)	-
Jumlah	122.421.071.000,00	121.611.384.386,00	99,34

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3  
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018



Belanja Pegawai  
Rp33.621.815.707,00

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.621.815.707,00 dan Rp Rp29.230.307.707,00. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,02 persen dari 31 Desember 2017.

Tabel 4  
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Naik
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	8.139.264.640,00	7.220.879.850,00	12,72
Belanja Pembulatan Gaji PNS	127.055,00	123.112,00	3,20
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	461.026.872,00	388.543.035,00	18,66
Belanja Tunj. Anak PNS	117.560.910,00	98.614.387,00	19,21
Belanja Tunj. Struktural PNS	607.220.000,00	616.570.000,00	(1,52)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	24.710.000,00	21.745.000,00	13,64
Belanja Tunj. PPh PNS	16.385.000,00	14.385.452,00	13,90
Belanja Tunj. Beras PNS	396.861.600,00	356.958.180,00	11,18
Belanja Uang Makan PNS	1.207.206.000,00	903.919.000,00	33,55
Belanja Tunjangan Umum PNS	438.370.000,00	350.635.000,00	25,02
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4.020,00	4.320,00	(6,94)
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	36.708.000,00	33.852.000,00	8,44
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	8.702.400,00	8.080.800,00	7,69
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.002.412.000,00	7,69
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.208.706.700,00	1.744.644.940,00	26,60
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.800,00	17.380.800,00	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	1.826.941.310,00	1.086.020.000,00	68,22
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	11.221.974.400,00	10.405.481.100,00	7,85

Jumlah Belanja Bruto	33.622.525.707,00	29.699.488.976,00	13,21
Pengembalian Belanja Pegawai	(710.000,00)	(469.181.269,00)	(99,85)
Jumlah Belanja Netto	33.621.815.707,00	29.230.307.707,00	15,02

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 2017



Belanja Barang  
Rp85.284.151.512,00

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp85.284.151.512,00 dan Rp83.458.856.862,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,19 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017.

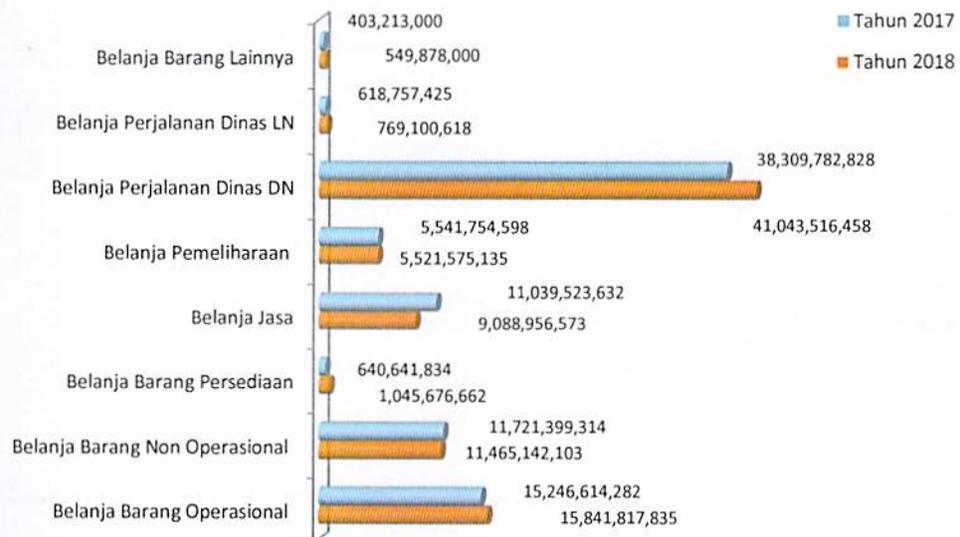
Tabel 5  
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Barang Operasional	15.841.817.835,00	15.246.614.282,00	3,90
Belanja Barang Non Operasional	11.465.142.103,00	11.721.399.314,00	(2,19)
Belanja Barang Persediaan	1.045.676.662,00	640.641.834,00	63,22
Belanja Jasa	9.088.956.573,00	11.039.523.632,00	(17,67)
Belanja Pemeliharaan	5.521.575.135,00	5.541.754.598,00	(0,36)
Belanja Perjalanan Dinas DN	41.043.516.458,00	38.309.782.828,00	7,14
Belanja Perjalanan Dinas LN	769.100.618,00	618.757.425,00	24,30
Belanja Barang Lainnya	549.878.000,00	403.213.000,00	36,37
Realisasi Belanja Barang Bruto	85.325.663.384,00	83.521.686.913,00	2,16
Pengembalian Belanja	(41.511.872,00)	(62.830.051,00)	(33,93)
Realisasi Belanja Barang Netto	85.284.151.512,00	83.458.856.862,00	2,19

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017



Belanja Modal  
Rp2.705.417.167,00

### B.5 Belanja Modal

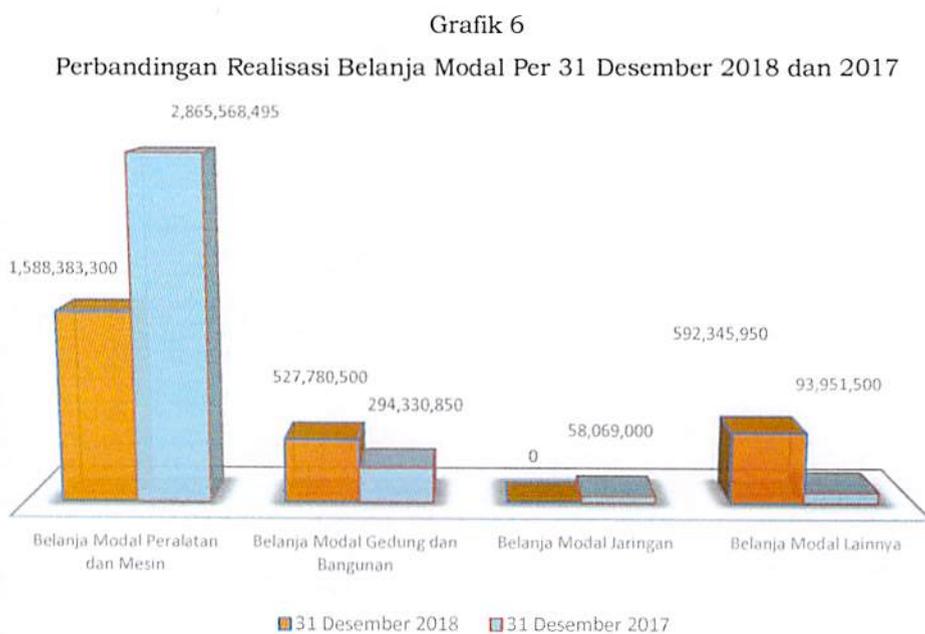
Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.705.417.167,00 mengalami penurunan sebesar (18,31) persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.311.919.845,00.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.588.383.300,00	2.865.568.495,00	(44,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	527.780.500,00	294.330.850,00	79,32
Belanja Modal Jaringan	0,00	58.069.000,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	592.345.950,00	93.951.500,00	530,48
Jumlah Belanja Bruto	2.708.509.750,00	3.311.919.845,00	(18,22)
Pengembalian Belanja	(3.092.583,00)	(0,00)	~
Jumlah Belanja Netto	2.705.417.167,00	3.311.919.845,00	(18,31)

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp6.448.280,00

### C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.448.280,00 dan Rp0,00 yang merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran, berupa akses log in ke dalam aplikasi [www.ssp.go.id](http://www.ssp.go.id) mengalami gagal log in, dan ketika sudah log in pembuatan id billing pajak sering kali mengalami kegagalan yang kemungkinan dikarenakan banyaknya K/L yang sedang mengakses situs tersebut, sehingga belum bisa diproses lebih lanjut.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	PPN	PPH 22	PPH 23
1	Kuitansi Nomor: K.17115 Tanggal 12/11/2018	586.364,00	87.955,00	0,00
2	Kuitansi Nomor: K.17161 Tanggal 12/11/2018	250.000,00	37.500,00	0,00
3	Kuitansi Nomor: K.171162 Tanggal 12/11/2018	468.182,00	70.227,00	0,00
4	Kuitansi Nomor: K.20947 Tanggal 14/12/2018	0,00	0,00	27.200,00
5	Kuitansi Nomor: K.21963 Tanggal 27/12/2018	859.545,00	128.932,00	0,00
6	Kuitansi Nomor: K.21964 Tanggal 27/12/2018	749.545,00	112.432,00	0,00
7	Kuitansi Nomor: K.21965 Tanggal 27/12/2018	572.727,00	36.818,00	65.455,00
8	Kuitansi Nomor: K.22060 Tanggal 27/12/2018	900.000,00	135.000,00	0,00
9	Kuitansi Nomor: K.22061 Tanggal 27/12/2018	845.455,00	126.818,00	0,00
10	Kuitansi Nomor: K.22095 Tanggal 28/12/2018	225.000,00	33.750,00	0,00
11	Kuitansi Nomor: K.22096 Tanggal 28/12/2018	112.500,00	16.875,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.569.318,00</b>	<b>786.307,00</b>	<b>92.655,00</b>
<b>JUMLAH PAJAK YANG BELUM DISETORKAN</b>			<b>6.448.280,00</b>	

Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp340.575.001,00

## **C.2 Belanja Dibayar Dimuka**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp340.575.001,00 dan Rp442.033.463,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp61.111.111,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau 2018. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 958/SPK/PPK-7.KY/09/2018 periode sewa 01 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019;
- b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp73.333.333,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur TA. 2018. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp110.000.000,00 sesuai Kontrak No. 957/SPK/PPK-7.KY/09/2018 periode sewa 01 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019;
- c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp76.775.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat TA. 2018. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.130.000,00 sesuai Kontrak No. 1316/SPK/PPK-7.KY/11/2018 periode sewa 01 November 2018 s.d. 31 Oktober 2019;
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp76.388.889,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku TA. 2018. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 1322/SPK/PPK-7.KY/11/2018 periode sewa 01 November 2018 s.d. 31 Oktober 2019;
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp52.966.667,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI

di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2018. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp79.450.000,00 sesuai Kontrak No. 956/SPK/PPK-7.KY/09/2018 periode sewa 01 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019.

Persediaan

Rp484.539.172,00

### C.3 Persediaan

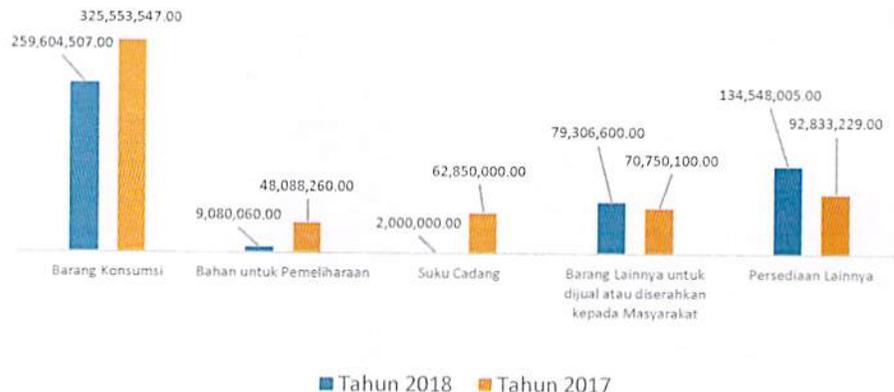
Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp484.539.172,00 dan Rp600.075.136,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	259.604.507,00	325.553.547,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	9.080.060,00	48.088.260,00
3	Suku Cadang	2.000.000,00	62.850.000,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	79.306.600,00	70.750.100,00
5	Persediaan Lainnya	134.548.005,00	92.833.229,00
Jumlah		484.539.172,00	600.075.136,00

Grafik 7  
Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017



Tanah

Rp48.799.520.400,00

**C.4 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp48.799.520.400,00 dan Rp47.188.389.400,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	:	47.188.389.400
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Pembelian	:	0,00
BMN Idle	:	1.611.131.000
<b>Mutasi Kurang:</b>		
Penghapusan	:	0,00
Saldo Per 31 Desember 2018	:	48.799.520.400,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	:	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	:	48.799.520.400,00

Penambahan Aset Tanah sebesar Rp1.611.131.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 88/KM.6/KN.5/2018 Tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle pada Komisi Yudisial.

*Tabel 8*  
*Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018*

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m <sup>2</sup>	47.188.389.400,00
2	2.01.01.04.001	730 m <sup>2</sup>	1.611.131.000,00
Jumlah		6.510 m <sup>2</sup>	48.799.520.400,00

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.
2. Tanah seluas 730 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

## Peralatan dan Mesin

Rp49.765.110.623,00

**C.5 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp49.765.110.623,00 dan Rp48.589.855.918,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.191.041.834,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp43.570.068.789,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	48.589.855.918,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.588.383.300,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang TA. 2018	81.700.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang TA. 2016	25.025.155,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Ekstrakomptabel	(44.853.750,00)
Reklasi ke Aset Tak Berwujud (Software)	(475.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2018	49.765.110.623,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(43.570.068.789,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	6.191.041.834,00

Penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 berupa :

1. Pengadaan Workstation di Lantai 1 dan 2 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebesar Rp151.000.000,00 sesuai dengan SPK Nomor:116/SPK/PPK-1.KY/2/2018 Tanggal 19 Februari 2018. SPM Nomor:00119/KYRI/2018 Tanggal 08 Maret 2018. SP2D Nomor: 181331303004316 Tanggal 12 Maret 2018.
2. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.100.000,00 sesuai Kuitansi No.473/K/PPK-1.KY/04/2018 Tanggal 27 April 2018. SPM Nomor:00314/KYRI/2018 Tanggal 04 Mei 2018. SP2D Nomor: 181331301026119 Tanggal 08 Mei 2018.
3. Pengadaan Instalasi Air Bersih Kantor Penghubung KY Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp18.436.000,00 sesuai Kuitansi

- No.201/K/PPK-1.KY/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018. SPM Nomor:00410/KYRI/2018 Tanggal 04 Juni 2018. SP2D Nomor: 181331301035223 Tanggal 05 Juni 2018.
4. Paket Pekerjaan Pengadaan Head Set Call Center – Contact Center sebesar Rp15.750.000,00 sesuai Kuitansi No.80/K/PPK-4.KY/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018. SPM Nomor:00709/KYRI/2018 Tanggal 16 Oktober 2018. SP2D Nomor: 181331301068684 Tanggal 18 Oktober 2018.
  5. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebesar Rp70.181.250,00 sesuai Kontrak No.898/SPK/PPK-1.KY/10/2018 Tanggal 12 Oktober 2018. SPM Nomor: 00718/KYRI/2018 Tanggal 22 Oktober 2018. SP2D Nomor: 181331302016595 Tanggal 23 Oktober 2018.
  6. Pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa Pemasangan CCTV di Ruang Server sebesar Rp17.600.000,00 sesuai SPK Nomor:828/SPK/PPK1.KY/09/2018 Tanggal 21 September 2018. SPM Nomor: 00728/KYRI/2018 Tanggal 30 Oktober 2018. SP2D Nomor: 181331301071635 Tanggal 01 November 2018.
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghubung berupa Mesin Absensi (Finger Print) di 6 Kota Penghubung Komisi Yudisial sebesar Rp67.008.000,00 sesuai Kontrak No.1154/SPK/PPK-7.KY/10/2018 Tanggal 24 Oktober 2018. SPM Nomor: 00739/KYRI/2018 Tanggal 07 November 2018. SP2D Nomor: 181331302018149 Tanggal 12 November 2018.
  8. Pengadaan Inventaris Kantor Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp69.738.750,00 sesuai Kontrak No.06/SPK/PPK-3.KY/10/2018 Tanggal 24 Oktober 2018. SPM Nomor: 00740/KYRI/2018 Tanggal 07 November 2018. SP2D Nomor: 181331304000309 Tanggal 12 November 2018.
  9. Pekerjaan Pengadaan Barang-Barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2018 sebesar Rp24.226.350,00 sesuai Kuitansi No.46/K/PPK-2.KY/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018. SPM Nomor: 00724/KYRI/2018 Tanggal 14 November 2018. SP2D Nomor: 181331301075756 Tanggal 15 November 2018.
  10. Biaya penggantian uang pembelian/pengadaan barang inventaris kantor berupa moshi USB-C Multiport Adapter sebesar

- Rp899.250,00 sesuai Kuintansi No.K.17328 Tanggal 13 November 2018. SPM Nomor: 00768/KYRI/2018 Tanggal 16 November 2018. SP2D Nomor: 181331301076772 Tanggal 19 November 2018.
11. Biaya Pengadaan Perlengkapan Alat Khusus Investigasi sebesar Rp19.950.000,00 sesuai SPK No. 001/SPK/PPK-5.KY/10/2018. SPM Nomor: 00784/KYRI/2018 Tanggal 27 November 2018. SP2D Nomor: 181331301078810 Tanggal 29 November 2018.
  12. Pengadaan Inventaris Kantor Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp71.625.000,00 sesuai Kontrak No.08/SPK/PPK-3.KY/11/2018 Tanggal 15 November 2018. SPM Nomor: 00774/KYRI/2018 Tanggal 27 November 2018. SP2D Nomor: 181331301078907 Tanggal 29 November 2018.
  13. Paket Pekerjaan Pengadaan Piranti Lunak Peralatan Call Center – Contact Application Package untuk 5 Agent sebesar Rp475.000.000,00 sesuai Kontrak No.70/SPK/PPK-4.KY/09/2018 Tanggal 24 September 2018. SPM Nomor: 00777/KYRI/2018 Tanggal 27 November 2018. SP2D Nomor: 181331302019989 Tanggal 29 November 2018.
  14. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial R.I Wilayah Sulawesi Selatan (Makassar) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp47.300.000,00 sesuai Kuitansi No.1304/PPK-7.KY/11/2018 Tanggal 22 November 2018. SPM Nomor: 00775/KYRI/2018 Tanggal 29 November 2018. SP2D Nomor: 181331302020531 Tanggal 05 Desember 2018.
  15. Paket Pekerjaan Pengadaan Barang-barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R.I. Tahun 2018 sebesar Rp35.400.000,00 sesuai Kuitansi No.52/K/PPK-2.KY/11/2018 Tanggal 23 November 2018. SPM Nomor: 00751/KYRI/2018 Tanggal 11 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301085099 Tanggal 12 Desember 2018.
  16. Paket Pekerjaan Pengadaan Barang-barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial R.I. Tahun 2018 sebesar Rp44.100.000,00 sesuai Kuitansi No.51/K/PPK-2.KY/11/2018 Tanggal 23 November 2018. SPM Nomor: 00752/KYRI/2018 Tanggal 11 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301085100 Tanggal 12 Desember 2018.

17. Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp49.400.000,00 sesuai Kuitansi No.879/K/PPK-3.KY/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018. SPM Nomor: 00843/KYRI/2018 Tanggal 13 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331302023073 Tanggal 17 Desember 2018.
18. Pekerjaan Pengadaan barang Inventaris Kantor berupa Sound System Ruang Auditorium Gedung Kantor Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp125.004.000,00 sesuai Kontrak No.1058/SPK/PPK-1.KY/11/2018 Tanggal 30 November 2018. SPM Nomor: 00834/KYRI/2018 Tanggal 18 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301089482 Tanggal 20 Desember 2018.
19. Pengadaan Inventaris Kantor Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp24.937.500,00 sesuai Kuitansi No.11/K/PPK-3.KY/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018. SPM Nomor: 00847/KYRI/2018 Tanggal 17 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301089561 Tanggal 20 Desember 2018.
20. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Sekretariat jenderal Komisi Yudisial RI sebesar Rp109.199.950,00 sesuai Kontrak No.1068/SPK/PPK-1.KY/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018. SPM Nomor: 00832/KYRI/2018 Tanggal 17 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331302024288 Tanggal 20 Desember 2018.
21. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial R.I. Wilayah Nusa Tenggara Timur (Kupang) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.200.000,00 sesuai Kuitansi No.1358/K/PPK-7.KY/12/2018 Tanggal 05 Desember 2018. SPM Nomor: 00849/KYRI/2018 Tanggal 19 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301090968 Tanggal 21 Desember 2018.
22. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial R.I. Wilayah Nusa Tenggara Barat (Mataram) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp49.981.250,00 sesuai Kuitansi No.1334/K/PPK-7.KY/11/2018 Tanggal 29 November 2018. SPM Nomor: 00848/KYRI/2018 Tanggal 18 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301090969 Tanggal 21 Desember 2018.
23. Pekerjaan Pengadaan Access Point dan Router sebesar Rp26.136.000,00 sesuai Kuitansi No.107/K/PPK-4.KY/12/2018 Tanggal 13 Desember 2018. SPM Nomor: 00860/KYRI/2018

Tanggal 19 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301091369  
Tanggal 26 Desember 2018.

24. Pengadaan barang inventaris kantor berupa external hardisk 1 TB dan 2 TB sebesar Rp4.955.000,00 sesuai faktur No. 71/Fak/RKU/XII/2018. SPM Nomor: 00902/KYRI/2018 Tanggal 31 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331701000248 Tanggal 31 Desember 2018.
25. Biaya Belanja Modal Pengadaan Inventaris Keperluan Kantor Komisi Yudisial RI sebesar Rp18.300.000,00 sesuai SPM Nomor: 00887/KYRI/2018 Tanggal 31 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331701000252 Tanggal 31 Desember 2018.
26. Biaya Pengadaan Peralatan IT di PALINFO Tahun 2018 sebesar Rp2.955.000,00 sesuai dengan faktur no: 85/Fak/RKU/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018. SPM Nomor: 00898/KYRI/2018 Tanggal 31 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331701000258 Tanggal 31 Desember 2018.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.588.383.300,00. Dari jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut dikapitalisasi sebesar Rp1.543.529.550,00 serta Ekstrakomptabel sebesar Rp44.853.750,00.

Pada Tahun 2018 terdapat Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp81.700.000,00 serta Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25.025.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.000.000,00 berupa Koreksi untuk Pembelian Lift Karpet sesuai SPM Nomor 00850/439479/2018, SP2D Nomor 181331301089680 Tanggal 20 Desember 2018.
- 2) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.700.000,00 berupa Koreksi untuk Pemeliharaan Kantor Penghubung Kalimantan Timur sesuai SPK Nomor: 992/SPK/PPK-7/09/2018.
- 3) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.025.155,00 berupa Koreksi untuk Pemeliharaan

Kantor Penghubung Sumatera Utara sesuai SPK Nomor: 1036/SPK/PPK-7/09/2018 sebesar Rp3.200.000,00 dan SPK Nomor:860/SPK/PPK-1.KY/09/2016 sebesar Rp21.825.155,00.

Rincian penambahan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	21	159.839.705,00
2	Alat Rumah Tangga	86	417.624.000,00
3	Alat Studio	8	64.720.800,00
4	Alat Komunikasi	2	476.562.500,00
5	Peralatan Pemancar	2	36.321.600,00
6	Komputer Unit	33	383.613.850,00
7	Peralatan Komputer	26	111.572.250,00
Jumlah			1.650.254.705,00

Rincian Ekstrakomptabel Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bantu	1	994.500,00
2	Alat Kantor	1	680.000,00
3	Alat Rumah Tangga	62	40.405.000,00
4	Peralatan Komputer	2	1.274.250,00
5	Alat Eksplorasi Topografi	3	1.500.000,00
Jumlah			44.853.750,00

Pada Tahun 2018 juga terdapat Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin kedalam Aset Tak Berwujud (Software) sebesar Rp475.000.000,00 sesuai SP2D Nomor:181331302019989 Tanggal 29 November 2018 berupa Pengadaan Paket Piranti Lunak Call Center – Contact Center Application Package untuk S Agent pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Gedung dan Bangunan  
Rp72.314.003.716,00

### C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp72.314.003.716,00 dan Rp71.676.580.588,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.820.767.508,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp13.493.236.208,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	71.676.580.588,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian Belanja Modal Gedung	527.780.500,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang	130.456.211,00
Mutasi Kurang :	
Ekstrakomptabel	17.721.000,00
Kelebihan Pembayaran	3.092.583,00
Saldo per 31 Desember 2018	72.314.003.716,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(13.493.236.208,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	58.820.767.508,00

Penambahan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 berupa :

1. Penggantian Tutup Menara Penangkal Petir Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp49.549.500,00 sesuai Kuitansi No.148/BA.PEMB/PPK-1.KY/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018. SPM Nomor: 00211/KYRI/2018 Tanggal 26 Maret 2018. SP2D Nomor: 181331301013360 Tanggal 26 Maret 2018.
2. Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Komisi Yudisial berupa Penggantian Penutup Dinding Tangga Utama Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 201 sebesar Rp196.840.000,00 sesuai Kontrak No.299/SPK/PPK-1.KY/04/2018 Tanggal 19 April 2018. SPM Nomor: 00380/KYRI/2018 Tanggal 24 Mei 2018. SP2D Nomor: 181331301032691 Tanggal 28 Mei 2018.
3. Pembuatan Ruang Bendahara Lantai 3 Gedung Kantor Komisi Yudisial sebesar Rp17.721.000,00 sesuai Kuitansi No.333/PPK-

- 1.KY/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018. SPM Nomor: 00451/KYRI/2018 Tanggal 21 Juni 2018. SP2D Nomor: 181331302008687 Tanggal 26 Juni 2018.
4. Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung kantor Komisi Yudisial berupa Penggantian Granit lantai Tangga Penghubung Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp198.670.000,00 sesuai Kontrak No.420/SPK/PPK-1.KY/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018. SPM Nomor: 00492/KYRI/2018 Tanggal 02 Juli 2018. SP2D Nomor: 181331303019304 Tanggal 03 Juli 2018.
5. Pekerjaan Pembuatan Kamar Mandi Klinik Gedung Kantor Komisi Yudisial R.I. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp65.000.000,00 sesuai Kontrak No.999/SPK/PPK-1.KY/11/2018 Tanggal 12 November 2018. SPM Nomor: 00786/KYRI/2018 Tanggal 03 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301080505 Tanggal 05 Desember 2018.

Pada Tahun 2018 terdapat Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp130.456.211,00 berupa Pengembangan Gedung dan Bangunan yang merupakan Penggantian Karpet Ruang Pimpinan sesuai SP2D Nomor: 181331301080496 Tanggal 05 Desember 2018 dan SPM Nomor: 00787/439479/2018.

Esktrakomptabel sebesar Rp17.721.000,00 merupakan Pembuatan Ruang Bendahara Lantai 3 Gedung Kantor Komisi Yudisial sebesar Rp17.721.000,00 sesuai Kuitansi No.333/PPK-1.KY/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018. SPM Nomor: 00451/KYRI/2018 Tanggal 21 Juni 2018. SP2D Nomor: 181331302008687 Tanggal 26 Juni 2018.

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi  
Rp3.588.869.628,00*

### **C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.588.869.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp131.783.697,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.457.085.931,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	3.588.869.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Penghentian dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2018	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(3.457.085.931,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	131.783.697,00

### C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp1.901.048.257,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp1.901.048.257,00 dan Rp1.256.182.536,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	1.256.182.536,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	253.696.450,00
Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2018	106.067.500,00
Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2018	124.200.520,00
Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2017	58.122.448,00
Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2016	102.778.803,00
Saldo per 31 Desember 2018	1.901.048.257,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	1.901.048.257,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 berupa :

1. Pengadaan Film Edukasi Publik Komisi Yudisial sebesar Rp193.850.000,00 sesuai Kontrak No.51/SPK/PPK-4.KY/07/2018 Tanggal 10 Juli 2018. SPM Nomor: 00614/KYRI/2018 Tanggal 28 Agustus 2018. SP2D Nomor: 181331302013000 Tanggal 30 Agustus 2018.
2. Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2018

- sebesar Rp59.846.450,00 sesuai Kontrak No.105/SPK/PPK-4.KY/11/2018 Tanggal 27 November 2018. SPM Nomor: 00842/KYRI/2018 Tanggal 13 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331303037895 Tanggal 17 Desember 2018.
3. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2018 sebesar Rp106.067.500,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Kalimantan Timur.
  4. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2018 sebesar Rp124.200.520,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Nusa Tenggara Barat.
  5. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2017 sebesar Rp58.122.448,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung.
  6. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung KY TA. 2016 sebesar Rp102.778.803,00 berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Sumatera Utara, sesuai SPK No.1036/SPK/PPK-1.KY/11/2016.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(60.520.390.928,00)

### C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah (Rp60.520.390.928,00) dan (Rp55.508.859.059,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 9  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	48.799.520.400,00	0,00	48.799.520.400,00
2	Peralatan dan Mesin	49.761.110.623,00	(43.570.068.789,00)	6.191.041.834,00
3	Gedung dan Bangunan	72.314.003.716,00	(13.493.236.208,00)	58.820.767.508,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	(3.457.085.931,00)	131.783.697,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.901.048.257,00	0,00	1.901.048.257,00
	Jumlah	176.364.552.624,00	(60.520.390.928,00)	115.669.584.566,00

Aset Tak Berwujud  
Rp3.017.355.940,00

### C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp3.017.355.940,00 dan Rp2.304.693.472,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	2.304.693.472,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	338.649.500,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	475.000.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghentian Penggunaan	100.987.032,00
Saldo per 31 Desember 2018	3.017.355.940,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(2.086.234.928,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	931.121.012,00

Penambahan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018 berupa :

1. Pekerjaan Pengadaan Lisensi Corel Draw, Adobe dan Navicat Tahun 2018 sebesar Rp56.496.000,00 sesuai Kontrak No.1008/SPK/PPK-1.KY/11/2018 Tanggal 14 November 2018. SPM Nomor: 00805/KYRI/2018 Tanggal 11 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301085088 Tanggal 12 Desember 2018.
2. Pekerjaan Pengadaan Software Operation/ Operating System Lisensi Microsoft Winpro 10 SNGL OLP NL Legalization Get Genuine sebesar Rp95.060.000,00 sesuai Kontrak No.1069/Perj/PPK-1.KY/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018. SPM Nomor: 00840/KYRI/2018 Tanggal 17 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331301088555 Tanggal 18 Desember 2018.
3. Pekerjaan Pengadaan Software Office Microsoft Office Std 2019 OLP NL Gov sebesar Rp187.093.500,00 sesuai Kontrak No.1070/Perj/PPK-1.KY/12/2018 Tanggal 03 Desember 2018. SPM Nomor: 00841/KYRI/2018 Tanggal 17 Desember 2018. SP2D Nomor: 181331302023764 Tanggal 18 Desember 2018.

4. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp475.000.000,00 berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Piranti Lunak Peralatan Call Center – Contact Application Package untuk 5 Agent sebesar Rp475.000.000,00 sesuai Kontrak No.70/SPK/PPK-4.KY/09/2018 Tanggal 24 September 2018. SPM Nomor: 00777/KYRI/2018 Tanggal 27 November 2018. SP2D Nomor: 181331302019989 Tanggal 29 November 2018.

Aset Lain-lain  
Rp100.987.032,00

### C.11 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp100.987.032,00 dan Rp522.029.174,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional sebagai berikut:

- 1) Software sebesar Rp74.300.000,00
- 2) Lisensi sebesar Rp26.687.032,00

Akumulasi Penyusutan  
Aset Lainnya  
(Rp2.086.234.928,00)

### C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah (Rp2.086.234.928,00) dan (Rp2.306.640.618,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 10  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	3.017.355.940,00	(2.086.234.928,00)	931.121.012,00
2	Aset Lain-lain	100.987.032,00	0,00	100.987.032,00
	Jumlah	3.118.342.972,00	(2.086.234.928,00)	1.032.108.044,00

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp129.925.795,00

### C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31

Desember 2017 masing-masing sebesar Rp129.925.795,00 dan Rp131.992.624,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat kewajiban yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Langganan Telepon untuk kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2018 sebesar Rp7.268.341,00.
2. Biaya Listrik untuk kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2018 sebesar Rp120.291.132,00.
3. Biaya Langganan Air untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2018 sebesar Rp2.366.322,00.

*Pendapatan Diterima  
di Muka  
Rp10.512.667,00*

#### **C.14 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.512.667,00 dan Rp72.900.667,00 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka yaitu berupa Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp10.512.667,00 merupakan Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m<sup>3</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai 1 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.769.000,00.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp6.448.280,00*

#### **C.15 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp6.448.280,00 dan Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana tersebut pada Utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima dimuka.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih ada kendala dalam proses penyeteroran, sehingga pajak tersebut belum diterima oleh Negara.

*Ekuitas*

*Rp117.564.945.451,00*

### **C.16 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp117.564.945.451,00 dan Rp118.148.316.347,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan PNBP  
Rp86.103.972,00*

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp86.103.972,00 dan Rp78.157.000,00. Pendapatan penerimaan bukan pajak sebagai berikut:

- a) Pendapatan Operasional atas sewa sebagian halaman gedung Komisi Yudisial RI sebesar Rp10.512.667,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m<sup>3</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai 1 September 2017 s.d. 31 Agustus 2018 sebesar Rp15.769.000,00.
- b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa ruang Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp62.388.000,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 02 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp124.776.000,00.
- c) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp 5.256.333,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m<sup>3</sup> di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 01 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019 sebesar Rp15.769.000,00.
- d) Tindak Lanjut Temuan Audit Operasional Semester I TA 2018 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Komisi Yudisial berupa Penggantian Granit Lantai Tangga sebesar Rp7.946.972,00.

*Beban Pegawai  
Rp33.621.815.707,00*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.621.815.707,00 dan Rp29.230.307.707,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 11*  
*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

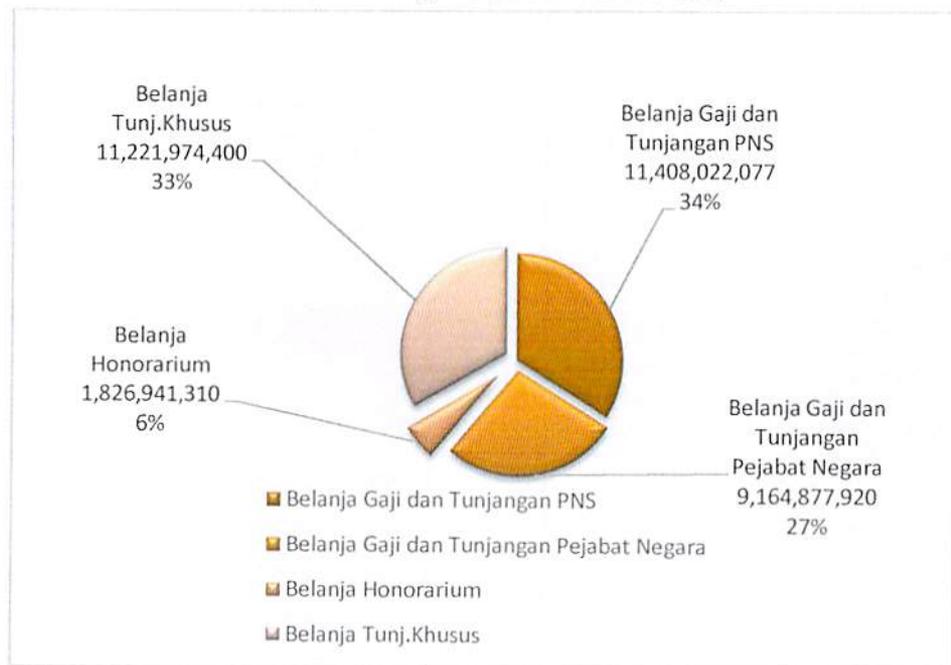
Uraian Jenis Belanja	Beban	Beban	Naik
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	8.139.264.640,00	7.220.879.850,00	12,72
Beban Pembulatan Gaji PNS	127.055,00	120.743,00	5,23
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	461.026.872,00	388.543.035,00	18,66
Beban Tunj. Anak PNS	117.560.910,00	98.614.387,00	19,21
Beban Tunj. Struktural PNS	606.510.000,00	616.200.000,00	(1,57)
Beban Tunj. Fungsional PNS	24.710.000,00	21.745.000,00	13,64
Beban Tunj. PPh PNS	16.385.000,00	14.385.452,00	13,90
Beban Tunj. Beras PNS	396.861.600,00	356.958.180,00	11,18
Beban Uang Makan PNS	1.207.206.000,00	903.919.000,00	33,55
Beban Tunjangan Umum PNS	438.370.000,00	350.635.000,00	25,02
Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4.020,00	4.320,00	(6,94)
Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	36.708.000,00	33.852.000,00	8,44
Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	8.702.400,00	8.080.800,00	7,69
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.002.412.000,00	7,69
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	2.208.706.700,00	1.744.644.940,00	26,60
Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.800,00	17.380.800,00	0,00
Beban Uang Honor Tetap	1.826.941.310,00	1.086.020.000,00	68,22
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	11.221.974.400,00	9.936.672.200,00	12,93
Jumlah Beban Pegawai	33.621.815.707,00	29.230.307.707,00	15,02

Tabel 12  
Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.408.022.077,00	9.972.000.647,00	14,40
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	9.164.877.920,00	8.235.614.860,00	11,28
Belanja Honorarium	1.826.941.310,00	1.086.020.000,00	68,22
Belanja Tunj.Khusus	11.221.974.400,00	9.936.672.200,00	12,93
Jumlah	33.621.815.707,00	29.230.307.707,00	15,02

Grafik 8

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2018



Beban Persediaan  
Rp1.062.540.070,00

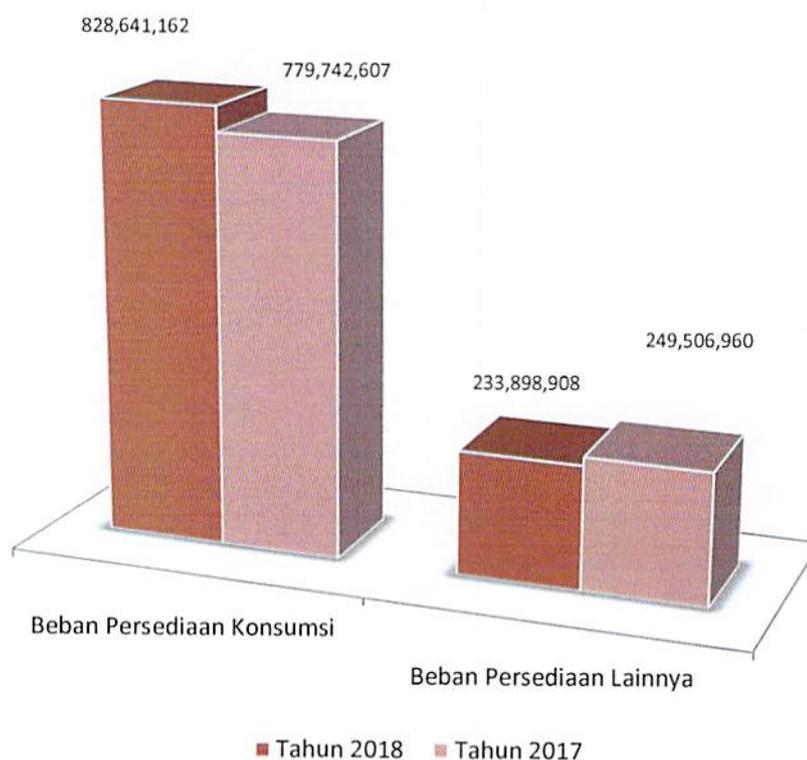
### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.062.540.070,00 dan Rp1.029.249.567,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	828.641.162,00	779.742.607,00	6,27
Beban Persediaan Lainnya	233.898.908,00	249.506.960,00	(6,26)
Jumlah Beban Persediaan	1.062.540.070,00	1.029.249.567,00	3,23

Grafik 9  
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017



Beban Barang dan Jasa  
Rp36.525.256.208,00

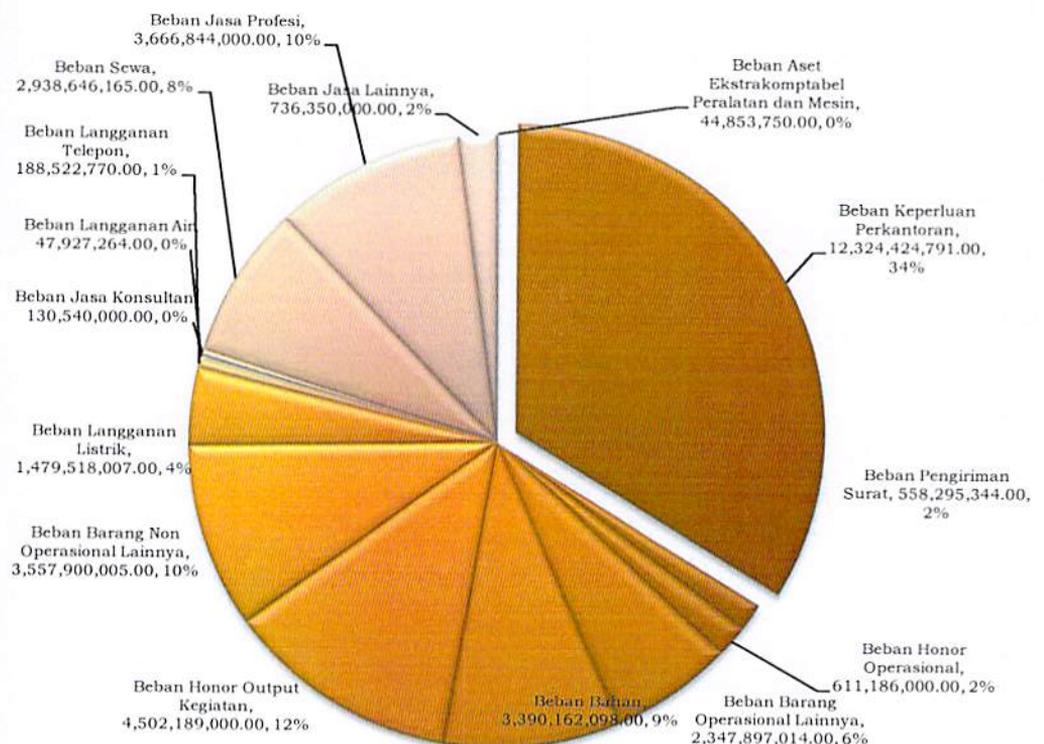
#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.525.256.208,00 dan Rp38.057.759.596,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	12.324.424.791,00	8.219.698.034,00	49,94
Beban Pengiriman Surat	558.295.344,00	555.558.394,00	0,49
Beban Honor Operasional	611.186.000,00	582.459.985,00	4,93
Beban Barang Operasional Lainnya	2.347.897.014,00	5.888.819.964,00	(60,13)
Beban Bahan	3.390.162.098,00	3.971.116.523,00	(14,63)
Beban Honor Output Kegiatan	4.502.189.000,00	3.344.634.500,00	34,61
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.557.900.005,00	4.369.346.791,00	(18,57)
Beban Langganan Listrik	1.479.518.007,00	1.420.440.116,00	4,16
Beban Langganan Telepon	188.522.770,00	301.899.365,00	(37,55)
Beban Langganan Air	47.927.264,00	50.470.742,00	(5,04)
Beban Jasa Konsultan	130.540.000,00	49.335.000,00	164,60
Beban Sewa	2.938.646.165,00	2.724.351.587,00	7,87
Beban Jasa Profesi	3.666.844.000,00	4.651.323.400,00	(21,17)
Beban Jasa Lainnya	736.350.000,00	1.927.745.195,00	(61,80)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	44.853.750,00	560.000,00	7.909,60
Jumlah	36.525.256.208,00	38.057.759.596,00	(4,03)

**Grafik 10**  
Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2018



Beban Pemeliharaan  
Rp5.219.023.255,00

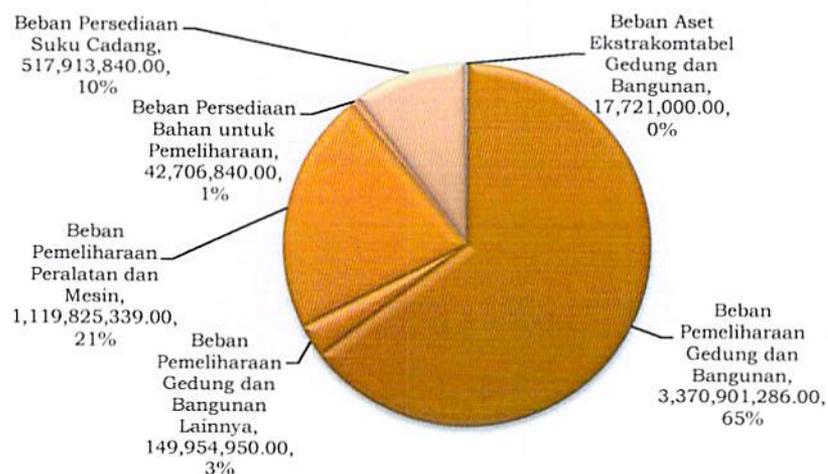
#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.219.023.255,00 dan Rp5.672.595.978,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.370.901.286,00	2.678.017.237,00	25,87
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	149.954.950,00	331.304.575,00	(54,74)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.119.825.339,00	2.154.432.786,00	(48,02)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	42.706.840,00	91.691.380,00	(53,42)
Beban Persediaan Suku Cadang	517.913.840,00	417.150.000,00	24,16
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17.721.000,00	0,00	~
Jumlah	5.219.023.255,00	5.672.595.978,00	(8,00)

Grafik 11  
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018



Beban Perjalanan Dinas  
Rp41.786.010.890,00

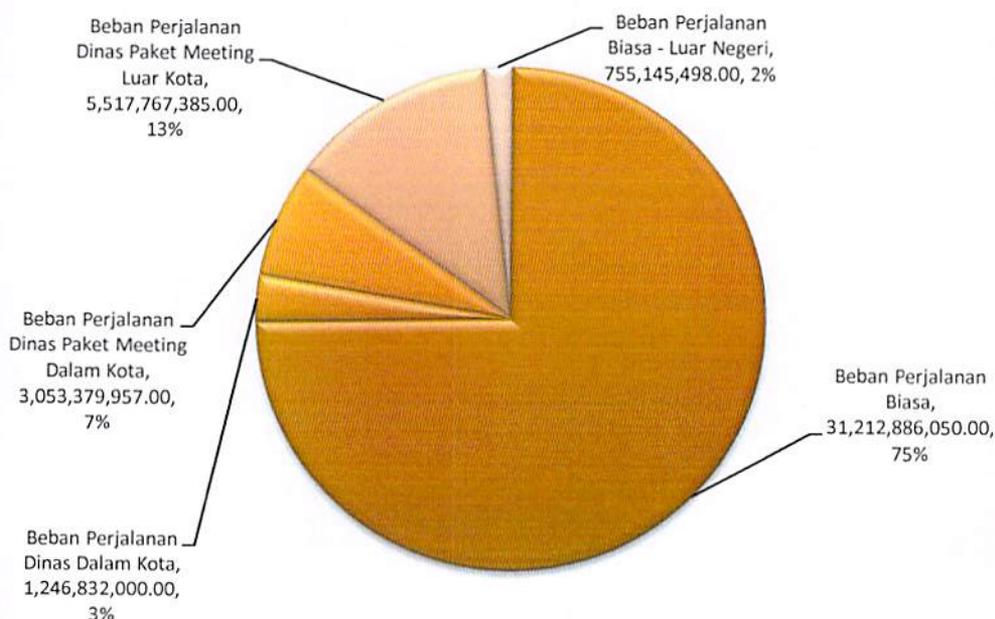
### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp41.786.010.890,00 dan Rp38.922.319.607,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	31.212.886.050,00	29.613.578.278,00	5,40
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.246.832.000,00	952.030.600,00	30,97
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.053.379.957,00	2.590.200.816,00	17,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.517.767.385,00	5.148.053.780,00	7,18
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	755.145.498,00	618.456.133,00	22,10
Jumlah	41.786.010.890,00	38.922.319.607,00	7,36

Grafik 12  
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018



Beban Barang Untuk  
Diserahkan Kepada  
Masyarakat  
Rp542.719.000,00

#### D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp542.719.000,00 dan Rp534.743.742,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17  
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	542.719.000,00	534.743.742,00	1,49
Jumlah	542.719.000,00	534.743.742,00	1,49

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp5.357.905.007,00

#### D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

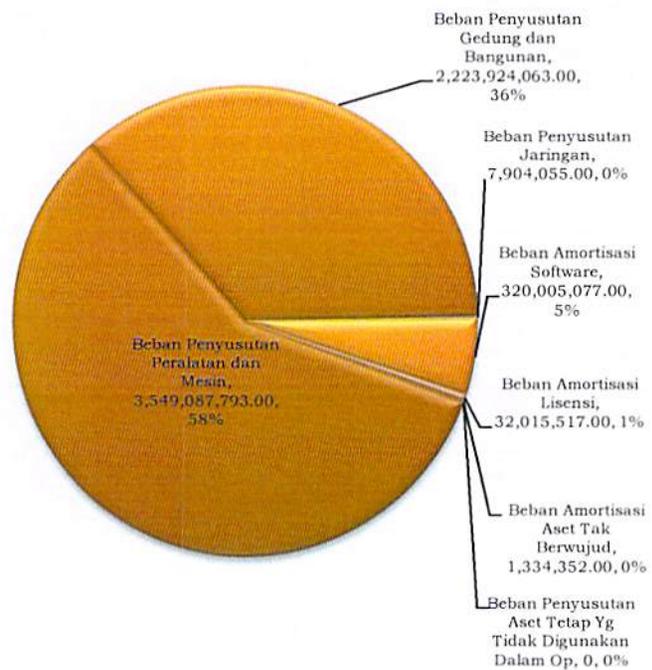
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.357.905.007,00 dan Rp5.257.791.246,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 18  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.549.087.793,00	3.534.721.625,00	0,41
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.223.924.063,00	1.433.372.612,00	55,15
Beban Penyusutan Jaringan	7.904.055,00	6.693.693,00	18,08
Beban Amortisasi Software	320.005.077,00	249.435.409,00	28,29
Beban Amortisasi Lisensi	32.015.517,00	30.525.069,00	4,88
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.334.352,00	0,00	~
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg Tidak Digunakan Dalam Op	0,00	3.042.838,00	(100,00)
Jumlah	5.271.889.047,00	5.257.791.246,00	16,67

Grafik 13

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018



Pendapatan Pelepasan  
Aset Non Lancar  
Rp11.250.000,00

#### D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.250.000,00 dan Rp100.000,00. Pendapatan PNPB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

Beban Pelepasan Aset  
Non Lancar  
Rp7.643.538,00

#### D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.643.538,00 dan Rp2.840.926,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

Pendapatan dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp79.241.255,00

#### D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp79.241.255,00 dan Rp50.614.737,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.525.935,00
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp5.797.000,00
3. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp71.918.320,00

*Beban dari Kegiatan  
Non Operasional  
Lainnya  
Rp55.598.525,00*

**D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp55.598.525,00 dan Rp7.607.472,00. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2018 yaitu berupa Beban Penyesuain Nilai Persediaan sebesar Rp55.598.525,00

*Surplus/ (Defisit) - LO  
(124.001.916.973,00)*

**D.13. Surplus / (Defisit) - LO**

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp124.001.916.973,00) dan (Rp118.586.344.104,00).

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp118.148.316.347,00*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp118.148.316.347,00 dan Rp120.896.715.248,00.

*Defisit LO*  
*Rp(124.001.916.973,00)*

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp124.001.916.973,00) dan (Rp118.586.344.104,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan*  
*Rp1.849.450.598,00*

**E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan**

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.849.450.598,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar Entitas*  
*Rp121.569.095.479,00*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp121.569.095.479,00 dan Rp115.837.945.203,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp121.611.384.386,00
2. Diterima dari Entitas Lain (Rp42.288.907,00)

*Ekuitas Akhir*  
*Rp117.564.945.451,00*

**E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp117.564.945.451,00 dan Rp118.148.316.347,00

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap sebagian objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas tanah dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp179.141.960.600,00.
2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp21.279.600.262,00.

Sehubungan dengan masa jabatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah memasuki tahun ke lima (5) pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana surat Ketua Komisi Yudisial ke Presiden Republik Indonesia Nomor 274/PIM/KP.02.02/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal penggantian Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, maka guna menjamin keberlangsungan dan kelancaran tugas Komisi Yudisial, Pimpinan Komisi Yudisial telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Ketua Komisi Yudisial Nomor 01/PIM/KP.09.01/8/2018.

Surat Perintah dimaksud memerintahkan kepada Sdr. Ronny Dolfinus Tulak, NIP 195907021987031001, Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal disamping jabatannya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sampai dengan diangkatnya Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia nomor R-525/Kemensetneg/D-3/AP.01.01/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Salinan Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2018 menyampaikan Salinan Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun

2018 yang berisi pemberhentian dengan hormat Sdr. Danang Wijayanto, Ak.,Msi., NIP 196204021982031001 dari Jabatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru dan dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa pengangkatan Sdr. Danang Wijayanto, Ak.,Msi. dalam jabatan fungsional Widyaiswara Ahli Utama terhitung mulai tanggal pelantikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.